



SURAT KETERANGAN

Nomor: 006-Perpus/277/FE-UNTAR/I/2025

Benar adanya bahwa Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara telah menerima dan mendokumentasikan hasil karya ilmiah dari:

Nama : Dr. Yusi Yusianto, S.E., M.E.

Jenis Karya : Penelitian

Tahun Karya : 2025

Judul : Institusi dan Kesejahteraan

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Jakarta, 30 Januari 2025

Kasubbag Perpustakaan



M. Jarkasih, S.S., M.Hum

Lembaga

- Pembelajaran
- Kemahasiswaan dan Alumni
- Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Penjaminan Mutu dan Sumber Daya
- Sistem Informasi dan Database

Fakultas

- Ekonomi dan Bisnis
- Hukum
- Teknik
- Kedokteran
- Psikologi
- Teknologi Informasi
- Seni Rupa dan Desain
- Ilmu Komunikasi
- Program Pascasarjana

Laporan Penelitian

Institusi dan Kesejahteraan



Yusi Yusianto
10198017

Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi & Binis
Universitas Tarumanagara
2024

Kata Pengantar

Penghargaan Nobel Ilmu Ekonomi tahun 2024 diberikan kepada Daron Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson yang menjelaskan hubungan antara institusi dan kemakmuran. Mereka telah juga mengembangkan alat teoritis yang dapat menjelaskan mengapa institusi bisa berbeda antara negara satu dengan negara lainnya, dan bagaimana institusi dapat berubah. Pada gilirannya, alat teoritis mereka dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa beberapa negara bisa menjadi kaya dan negara lainnya menjadi miskin.

Topik penelitian mereka sangat relevan dengan perkembangan di dunia, termasuk Indonesia, saat ini. Saat ini, kita masih mengamati ke arah mana institusi yang akan terjadi di negara-negara saat ini. Banyak terjadi di dunia dan di Indonesia yang membuat kita perlu mengevaluasi dan menilai kembali arah institusi yang akan terbentuk nantinya. Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian awal ini dilakukan. Penelitian kali ini mempelajari konsep institusi, faktor-faktor yang mempengaruhi institusi, hubungan institusi dan kemakmuran atau kesejahteraan dan menganalisis indikator institusi.

Dalam penelitian ini, penulis mendapat berbagai dukungan, khususnya, dari pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara (FEB Untar). Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Dekan FEB Untar, bapak Prof. Dr. Sawidji Widodoatmodjo, MM., MBA, Ketua Program Studi S1 Manajemen FEB Untar, bapak Dr. Franky Slamet, SE., MM, dan Sekretaris Program Studi S1 Manajemen FEB Untar, ibu Dr. Lydiawati Soeleiman, ST., MM. dan ibu RR. Kartika Nuringsih, SE., M.Si.

Jakarta, Desember 2024

Dr. Yusi Yusianto, SE., ME

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Pendahuluan	1
Pengertian Institusi.....	2
Faktor-faktor yang Membentuk Institusi	3
Peran Institusi bagi Kesejahteraan	4
Indikator Institusi	5
Analisis Indikator Institusi.....	7
Kesimpulan	10
Referensi	11

DAFTAR TABEL

Tabel 1 WGI Indonesia Tahun 1996 - 2022.....	7
Tabel 2 WGI Average dan GNI/ Capita 2022: Beberapa Negara.	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 WGI Average dan GNI / Cap 2022.	9
---	---

Peran Institusi bagi Kesejahteraan Negara

(Yusi Yusianto)

Pendahuluan

Akademi Ilmu Pengetahuan Kerajaan Swedia telah memutuskan untuk menganugerahkan Penghargaan Sveriges Riskbank dalam Ilmu Ekonomi, untuk mengenang Alfred Nobel, tahun 2024, kepada Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT), dan James A. Robinson (Chicago University). Ketiganya diberi penghargaan tersebut atas kontribusinya dalam menjelaskan peranan institusi bagi kemakmuran atau kesejahteraan suatu negara dan ketimpangan pendapatan antar negara secara global. Penghargaan tersebut diberikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang sama dengan penerima penghargaan Nobel.

Sebenarnya, penghargaan yang berkaitan dengan peranan institusi dalam perekonomian ini bukan yang pertama. Di antara nama yang dapat disebut adalah Ronald Coase, yang menerima penghargaan Nobel Ilmu Ekonomi tahun 1991 dan Douglas C. North, yang menerima penghargaan tahun 1993. Kontribusi Coase adalah menjelaskan hubungan antara institusi dan biaya transaksi. Ketika biaya transaksi relatif rendah, institusi mungkin tidak menjadi masalah. Namun, Ketika biaya transaksi relatif mahal, maka di situ mungkin terjadi masalah dalam institusinya. Kontribusi North adalah menjelaskan bahwa institusi yang berkembang di masyarakat, baik bersifat formal maupun informal, dapat menentukan kualitas institusi. Institusi yang kuat dan efektif dapat membuat biaya produksi dan transaksi menjadi efisien.

Lalu, apa bedanya pemikiran Acemoglu, Johnson, dan Robinson dengan pemikiran mengenai faktor institusi sebelumnya? Penelitian mereka diawali dengan pertanyaan mengapa negara dapat menjadi kaya dan miskin? Selanjutnya, mereka mempelajari sejarah ekonomi dan politik beberapa negara dari dua kelompok negara tersebut. Akhirnya, dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan suatu negara, mereka menyimpulkan bahwa institusi merupakan faktor utamanya. Institusi ekonomi yang baik, seperti perlindungan hak milik dan penegakan hukum yang adil, sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan suatu negara. Lebih jauh, perbedaan institusi juga dapat digunakan untuk menjelaskan ketimpangan pendapatan global. Negara-negara yang memiliki institusi yang lebih baik cenderung memiliki pendapatan per kapita yang lebih tinggi ketimbang negara-negara yang institusinya yang buruk.

Topik institusi muncul pada penghargaan tahun 2024, tampaknya sangat relevan dengan perkembangan politik global dan domestik saat ini. Perkembangan politik yang terjadi saat ini menimbulkan pertanyaan mengenai bentuk dan kualitas institusi yang terjadi saat ini dan di masa depan karena karena meningkatnya ketidakpastian di tingkat global dan domestik. Pemahaman mengenai peranan institusi diharapkan akan mengingatkan kembali betapa penting untuk menjaga kualitas institusi demi kesejahteraan penduduk suatu negara dan dunia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, tulisan ini dibuat untuk mendalami konsep dan peranan institusi bagi pembangunan ekonomi serta mencoba melihat perkembangan indikator institusi Indonesia dan beberapa negara.

Pengertian Institusi

North (1991) mendefinisikan institusi sebagai aturan, norma, dan praktik yang membentuk perilaku individu dan kelompok masyarakat dalam interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Institusi yang berkembang di dalam masyarakat dapat bersifat formal dan informal. Institusi formal merupakan aturan dan regulasi yang ditetapkan secara resmi dan diakui oleh Masyarakat; sedangkan, institusi informal merupakan norma, tradisi, dan praktik yang tidak tertulis namun diakui dan diikuti oleh masyarakat. Menurut North, kualitas suatu institusi dapat memberi dampak pada biaya transaksi dan biaya produksi. Institusi yang kuat dan efektif dapat mengurangi biaya transaksi dan menurunkan biaya produksi.

Acemoglu, Johnson, dan Robinson (The Royal Swedish Academy of Sciences, 2024) membedakan institusi menjadi dua kategori, yakni, institusi ekstraktif dan institusi inklusif. Institusi ekstraktif merupakan struktur yang dirancang untuk melayani kepentingan sekelompok kecil individu atau elit, yang acap kali mengorbankan kesejahteraan masyarakat umum. Sebaliknya, institusi inklusif memberikan akses yang luas kepada semua anggota masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses ekonomi dan politik. Institusi ini mendorong partisipasi yang lebih besar, transparansi, dan akuntabilitas. Konsekuensinya, institusi ekstraktif menciptakan ketimpangan yang signifikan, sedangkan institusi inklusif memberi kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, maka institusi, baik formal maupun informal, dapat membuat institusinya menjadi bersifat ekstraktif atau inklusif. Sifat institusi yang berkembang dipengaruhi oleh berbagai faktor dan bersifat kompleks. Faktor-faktor tersebut, antara lain, sejarah dan budaya yang berkembang di wilayah tersebut; faktor ekonomi; faktor politik; dan peran masyarakat sipil. Apabila pengaruhnya memberi hasil institusi yang

ekstraktif, maka institusinya dapat dikatakan lemah bagi kemakmuran wilayah tersebut. Sebaliknya, apabila pengaruhnya memberi hasil institusi yang inklusif, maka institusinya dapat dikatakan kuat bagi kemakmuran wilayah tersebut.

Faktor-faktor yang Membentuk Institusi

Acemoglu, Johnson dan Robinson (2005) menyadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhi terbentuknya suatu institusi yang berkembang di suatu wilayah atau negara. Hal ini lah yang menjelaskan mengapa institusi ekonomi bervariasi di berbagai negara. Mereka menyoroti tiga poin kunci yang menjelaskan perbedaan tersebut, antara lain, melalui konsep perbedaan geografi, konflik sosial, dan sejarah.

Faktor-faktor geografis seperti iklim, topografis dan sumber daya alam dapat membentuk institusi yang berkembang di suatu wilayah. Namun, Acemoglu, Johnson dan Robinson (2005) menilai bahwa pendekatan ini masih belum memadai untuk menjelaskan variasi institusi karena tidak semua negara dengan latar belakang geografis yang sama memiliki institusi yang sama.

Konflik sosial yang terjadi akibat akumulasi kekuatan dan konflik yang terjadi antar kelompok sosial atau politik dapat membentuk institusi yang berkembang di wilayah tersebut. Bentuk institusi yang berkembang di wilayah tersebut ditentukan oleh karakter yang berkuasa. Apabila karakter yang berkuasa mengatur sistem untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, maka institusi yang terbentuk merupakan institusi yang bersifat ekstraktif. Menurut Acemoglu, Johnson dan Robinson (2005), pemahaman mengenai konflik sosial sangat penting untuk menjelaskan mengapa institusi di suatu wilayah tidak selalu berkembang ke arah yang baik.

Peristiwa dan proses sejarah suatu wilayah dapat juga membentuk institusi di suatu wilayah. Peristiwa seperti kolonialisasi, revolusi, dan perang dapat memiliki dampak jangka panjang pada struktur institusi suatu negara. Acemoglu, Johnson dan Robinson (2005) memiliki perhatian khusus terhadap pendekatan ini karena mereka menilai bahwa banyak institusi yang berkembang saat ini merupakan hasil dari sejarah suatu wilayah. Kesimpulan tersebut diperoleh dari sejarah dan studi kasus, antara lain, masa kolonialisasi di Amerika Latin dan Amerika Utara, reformasi institusi di Inggris pada abad ke 17 dan 18, kasus Korea Selatan dan Korea Utara, perbandingan Sudan dan Ghana, dan transformasi ekonomi di Timor Timur.

Dari ketiga faktor di atas, Acemoglu, Johnson dan Robinson (2005) cenderung menyoroti pendekatan konflik sosial dan sejarah sebagai faktor yang lebih dapat menjelaskan mengenai variasi institusi. Namun, mereka juga mendorong penelitian lebih lanjut untuk

mengungkap kompleksitas faktor institusi. Mereka mengingatkan hal tersebut karena institusi tidak bersifat statis melainkan endogen. Institusi merupakan entitas yang berkembang sejalan dengan perubahan dalam kekuasaan politik dan ekonomi baik di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya, proses adaptasi institusi terhadap perubahan dalam masyarakat, ekonomi, dan lingkungan internasional juga berkontribusi terhadap variasi institusi di berbagai wilayah. Wilayah yang mampu beradaptasi dengan lebih baik terhadap tantangan baru cenderung memiliki institusi yang lebih kuat dan relevan bagi perkembangan wilayah tersebut.

Peran Institusi bagi Kesejahteraan

Acemoglu, Johnson dan Robinson (2005) mengemukakan bahwa institusi memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu wilayah. Institusi yang kuat dan transparan, atau institusi yang bersifat inklusif, dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang melalui, antara lain, a) memberikan insentif bagi individu dan perusahaan untuk berinvestasi dan berinovasi melalui hak kekayaan intelektual, perlindungan hak kepemilikan, keadilan hukum, memiliki sistem pendidikan yang baik dan pengendalian pasar; b) meningkatkan stabilitas ekonomi dan politik, yang pada gilirannya dapat membangun kepercayaan publik, pelaku ekonomi, dan investor serta mengurangi ketidakpastian; dan c) pemberantasan korupsi, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk investasi produktif sehingga sumber daya dapat dialokasikan secara efisien.

Meskipun institusi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, namun dampaknya lebih mendalam dan berkelanjutan dalam konteks pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam jangka pendek, institusi dapat mempengaruhi pertumbuhan melalui stabilitas ekonomi dan pengaturan pasar. Dalam jangka panjang, akumulasi institusi tersebut akan dapat disimpulkan oleh publik apakah institusinya bersifat inklusif atau ekstraktif, yang akan mempengaruhi kepercayaan publik, dan pada gilirannya, kepastian dan stabilitas ekonomi.

Institusi yang lemah bagi kesejahteraan cenderung menciptakan lingkungan yang kurang atau tidak kondusif bagi investasi; menciptakan ketidakstabilan makroekonomi; ketimpangan distribusi kekayaan dan kesempatan dalam masyarakat; pengembangan sumber daya manusia yang kurang baik; dan kurang mampu mengatasi konflik serta berperan sebagai mediator di dalam masyarakat. Sebaliknya, institusi yang kuat bagi kemakmuran cenderung menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi; mampu menciptakan stabilitas

makroekonomi; distribusi kekayaan dan kesempatan yang lebih merata; mampu mengembangkan sumber daya manusia yang baik; dan mampu mengatasi konflik serta berperan sebagai mediator di dalam Masyarakat. Dengan demikian, institusi yang kuat dan inklusif selain dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, juga dapat meningkatkan kesejahteraan. Oleh karenanya, penguatan institusi harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan suatu negara.

Namun, perlu disadari bahwa penguatan institusi tidak bisa bersifat instan, melainkan perlu proses berikut dinamikanya. Maka, dalam pembentukan institusi menjadi institusi inklusif perlu melibatkan partisipasi masyarakat, menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi, penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mampu beradaptasi dan responsif terhadap perubahan yang terjadi. Proses semacam ini lah yang membuat pembentukan institusi menjadi kompleks dan tidak pasti karena banyak faktor yang mempengaruhinya, yang hasilnya bisa cenderung menjadi institusi inklusif, atau institusi ekstraktif.

Indikator Institusi

Sehubungan dengan indikator kualitas institusi, World Bank (Kaufmann & Kraay, 2024) menggunakan *Worldwide Governance Indicators* (WGI) sebagai indikator agregat tata kelola yang mencerminkan berbagai aspek pemerintahan dan kualitas kelembagaan di berbagai negara. WGI terdiri dari enam indikator berikut:

1. Suara dan akuntabilitas (*voice and accountability*): Indikator ini mengukur seberapa besar partisipasi warga negara dalam proses politik dan seberapa besar mereka mengekspresikan pandangan mereka. Ini mencakup kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, dan akses terhadap informasi. Indikator ini memberi gambaran tentang bagaimana rakyat terlibat dalam memilih pemerintah dan berkontribusi pada pengambilan keputusan publik.
2. Stabilitas politik dan ketiadaan kekerasan/terorisme (*political stability and absence of violence/terrorism*): Indikator ini menilai kemungkinan bahwa pemerintah saat ini akan digulingkan melalui cara-cara yang tidak konstitusional dan kemungkinan terjadinya kekerasan atau terorisme. Itulah sebabnya, indikator ini penting untuk memahami risiko ketidakstabilan politik dalam suatu negara yang dapat mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi.
3. Efektivitas pemerintah (*government effectiveness*): Indikator ini menggambarkan kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang efektif. Ini

mencakup kualitas layanan publik, komitmen terhadap kebijakan publik, dan kemauan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Efektivitas pemerintah sangat penting untuk pencapaian tujuan Pembangunan nasional dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi investasi.

4. Kualitas regulasi (*regulatory quality*): Indikator ini mengukur kemampuan pemerintah dalam merumuskan dan menetapkan regulasi yang bersahabat dan efektif. Kualitas regulasi mencakup bagaimana kebijakan yang ada mendukung pertumbuhan ekonomi, perlindungan hak milik, dan mendorong inovasi. Indikator ini juga mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengaturan.
5. Aturan hukum (*rule of law*): Indikator ini mencerminkan sejauh mana hukum diterapkan secara adil dan konsisten, serta sejauh mana institusi hukum berfungsi dengan baik. Ini termasuk hak atas properti, penegakan hukum, independensi peradilan, dan perlindungan terhadap individu dari penyalahgunaan oleh garis kekuasaan. Aturan hukum yang kuat sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan dalam Masyarakat.
6. Pengendalian korupsi (*control of corruption*): Indikator ini mengukur sejauh mana korupsi dalam sektor publik dapat terkendali. Ini mencakup persepsi tentang penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, berbagai bentuk korupsi, dan integritas kebijakan publik. Pengendalian korupsi diperlukan untuk mendukung kebijakan yang efektif dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi public.

Terdapat dua cara dalam menggunakan data WGI. Pertama, dalam unit standar normal, yang angkanya berkisar antara - 2,5 hingga 2,5. Kedua, dalam bentuk *percentiles rank*, yang angkanya berkisar antara 0 hingga 100. Penelitian ini akan menggunakan *percentile rank*. *Percentile rank* dari suatu skor merupakan persentase dari nilai di dataset yang lebih rendah daripada skor tersebut. Misalnya, jika sebuah negara memiliki *percentile rank* 75, berarti 75% negara lain memiliki skor di bawah skor negara tersebut. Rentang *percentile rank* berkisar dari 0 hingga 100. Angka 0 persen menunjukkan bahwa tidak ada nilai lain yang lebih rendah (nilai terendah), sedangkan angka 100 persen menunjukkan bahwa tidak ada nilai lain yang lebih tinggi (nilai tertinggi).

Analisis Indikator Institusi

Tabel 1 menggambarkan perkembangan data WGI Indonesia dari tahun 1996 sampai tahun 2022. Dari keenam indikator, Indonesia di atas 50 persen negara lain dalam efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, dan partisipasi publik. Tiga indikator sisanya, Indonesia di bawah 50 persen negara lainnya. Indikator terendah adalah stabilitas politik dan keamanan, pengendalian korupsi, dan pemberdayaan hukum. Dalam stabilitas politik, Indonesia hanya lebih tinggi daripada 25,9 persen negara lainnya ada tahun 2022; sedangkan, dalam pengendalian korupsi, Indonesia hanya lebih tinggi daripada 37,3 persen negara lainnya. Dari data tersebut dapat dibuat rata-rata agregat WGI dari tahun 1996 hingga 2022, angka rata-rata agregat WGI adalah 36,2. Artinya, rata-rata agregat WGI Indonesia lebih tinggi daripada 36,2 persen negara lainnya. Apabila melihat rentang angka agregat WGI yang berkisar antara 0 persen hingga 100 persen, maka dapat dikatakan bahwa kualitas institusi Indonesia masih relatif rendah. Sebagai catatan, data juga menunjukkan bahwa di Indonesia terdapat penurunan kinerja pengendalian korupsi sejak tahun 2017 dan penurunan stabilitas politik sejak tahun 2016.

Tabel 1
WGI Indonesia, Tahun 1996 - 2022

Year	Control of Corruption: Percentile Rank	Government Effectiveness: Percentile Rank	Political Stability and Absence of Violence / Terrorism: Percentile Rank	Regulatory Quality: Percentile Rank	Rule of Law: Percentile Rank	Voice and Accountability: Percentile Rank
	Unit (0.0)	Unit (0.0)	Unit (0.0)	Unit (0.0)	Unit (0.0)	Unit (0.0)
1996	22,0	23,5	13,8	52,7	36,2	20,5
1998	10,7	25,7	7,4	35,9	27,5	17,4
2000	21,8	43,7	2,6	40,2	30,8	43,3
2002	8,5	37,3	9,0	23,8	21,4	41,8
2003	15,3	32,4	3,0	19,5	23,4	40,8
2004	17,7	39,8	4,4	22,4	28,8	40,4
2005	18,5	37,7	7,8	25,5	26,3	45,7
2006	20,5	43,4	10,1	39,2	29,2	45,2
2007	31,1	45,1	13,0	38,8	28,7	46,6
2008	32,5	46,1	15,9	44,2	30,3	47,1
2009	20,6	45,5	21,3	42,1	32,7	47,9
2010	21,9	45,0	20,4	39,2	30,8	48,3
2011	23,7	44,1	20,9	41,7	31,9	48,8
2012	28,4	43,6	25,6	45,5	33,8	52,6
2013	29,4	46,0	28,4	47,4	36,6	50,2
2014	32,2	51,4	30,0	51,9	44,7	51,7
2015	36,7	42,9	24,3	48,1	39,5	53,7
2016	38,1	50,0	32,4	51,9	40,5	51,7
2017	45,2	53,3	28,1	55,7	40,0	51,2
2018	44,3	59,0	26,4	52,4	41,9	51,9
2019	35,2	59,5	26,9	56,7	40,5	51,7
2020	36,7	63,8	28,3	58,1	40,5	52,2
2021	36,7	64,3	27,4	61,0	44,3	53,1
2022	37,3	66,0	25,9	59,4	45,3	52,7

Sumber: World Bank

Kembali pada topik penelitian Acemoglu, Johnson dan Robinson (2005) bahwa institusi memiliki peran bagi kemakmuran atau kesejahteraan, maka penelitian ini akan menampilkan dua data, yakni angka rata-rata agregat WGI beberapa negara dalam periode 1996 – 2022 dan *Gross National Income per capita* (GNI per capita) beberapa negara pada tahun 2022. Pertimbangan data tersebut ditampilkan untuk melihat kemungkinan bahwa GNI per capita tahun 2022 dapat dicapai melalui proses perbaikan kualitas institusi.

Tabel 2 membandingkan data rata-rata WGI beberapa negara dari tahun 1996 hingga 2022 dengan data GNI per capita tahun 2022. Kriteria negara yang dipilih memang terbatas, namun mewakili negara maju, Korea Selatan, ASEAN, dan BRICS. Korea Selatan dipilih karena mewakili negara-negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.

Tabel 2
WGI Average dan GNI/Cap 2022 Beberapa Negara

Country	WGI Average	GNI / Cap - 2022
Canada	93,4	53.300
Germany	90,0	53.800
United Kingdom	88,1	48.520
Singapore	87,8	66.970
Japan	85,7	42.550
United State	84,3	77.460
South Korea	72,9	36.160
Malaysia	60,8	11.610
South Africa	58,1	6.530
Brazil	49,2	8.450
Thailand	46,4	7.230
India	44,7	2.380
Philippines	40,5	4.010
China	37,2	12.860
Viet Nam	36,6	3.960
Indonesia	36,2	4.520
Russian	26,5	12.810

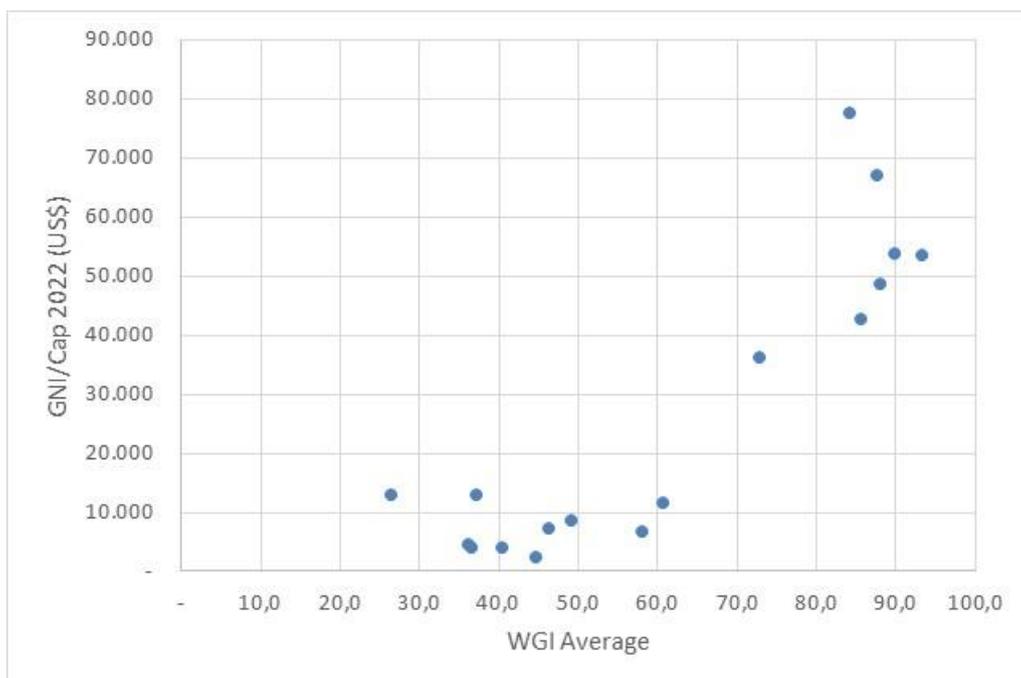
Sumber: Diolah dari data World Bank

Tabel 2 menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa terlihat hubungan positif antara rata-rata agregat WGI dan GNI/Cap tahun 2022. Namun, anomali terdapat pada negara Tiongkok dan Rusia karena sistem perekonomiannya yang terpusat atau berbeda dari negara lainnya. Tampaknya, ini menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi kedua negara tersebut perlu tambahan variabel atau indikator lain di luar keenam indikator yang ada dalam WGI sebagai penejasannya. Menurut data, kedua negara tersebut sangat rendah pada indikator *voice and*

accountability yang mencerminkan indikator demokrasi. Pada tahun 2022, angka Rusia adalah 14,5 dan Tiongkok adalah 6,3. Angka tersebut sangat rendah sehingga sulit mengharapkan kedua negara tersebut memperbaiki kelima indikator lainnya. Namun, Pemerintah dan partai komunis Tiongkok yang berkuasa ternyata punya komitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, yakni menciptakan pemerintahan yang efektif, pengendalian korupsi, dan pemberdayaan hukum sehingga angka WGI ketiga indikator tersebut sudah di atas 50 persen.

Catatan lainnya adalah tidak ada jaminan bahwa negara yang angka rata-rata WGI nya lebih tinggi dari negara lainnya, maka GNI per capita-nya juga pasti lebih tinggi. Namun, kesimpulan yang dapat diambil tampaknya adalah setelah rata-rata agregat WGI di atas 80, terdapat kecenderungan bahwa GNI per capitanya bisa US\$ 40,000 dan ke atas.

Data tabel 2 ditransformasikan ke dalam Gambar 1 di bawah untuk melihat kecenderungan arah hubungan antara rata-rata agregat WGI dan GNI per capita tahun 2022. Data angka rata-rata agregat WGI berada pada sumbu horizontal, sedangkan data GNI per capita tahun 2022 berada pada sumbu vertikal.



Gambar 1: WGI Average dan GNI per Capita 2022

Sumber: diolah dari data Tabel 1

Gambar 1 menunjukkan kecenderungan hubungan yang memiliki arah positif antara rata-rata agregat WGI dan GNI per capita tahun 2022. Dengan perkataan lain, secara umum, kenaikan angka rata-rata agregat WGI akan dapat meningkatkan GNI per capita.

Kesimpulan

Secara umum, terdapat hubungan positif antara rata-rata agregat WGI dan GNI per capita tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan angka rata-rata agregat WGI akan dapat meningkatkan GNI per capita. Berkaitan dengan temuan ini, angka rata-rata agregat WGI Indonesia relatif masih rendah, yakni 36,2. Apabila Indonesia ingin menjadi negara berpendapatan tinggi atau negara maju, maka, menurut konsep Acemoglu, Johnson, dan Robinson, Indonesia perlu memperbaiki kualitas institusinya.

Temuan ini juga menemukan bahwa konsep Acemoglu, Johnson dan Robinson masih belum dapat menjelaskan pada kasus seperti di negara Rusia dan Tiongkok. Angka rata-rata agregat WGI nya relatif rendah, namun GNI per capita nya dapat mencapai US\$ 14,250 (Rusia) dan US\$ 13,390 (Tiongkok). Untuk kedua negara ini tampaknya perlu penelitian yang lebih mendalam.

Referensi

- Kaufmann, D., and Kraay, A., (2024). The Worldwide Governance Indicators Methodology and 2024 Update. *Policy Research Working Paper 10952*. November. Worl Bank. [World Bank Document](#)
- North, D. C., (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*. 5(1): 97–112. [North \(1991\).pdf](#)
- The Royal Swedish Academy of Sciences. (2024). *Scientific Background to the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2024*. The Committee for the Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. [advanced-economicsciencesprize2024.pdf](#)
- North, D.C., (1993). Prize Lecture. *Award Ceremony Speech*. December 9.
- Acemoglu, D., Johnson, S., and Robinson, J.A., (2005). Institutions as a Fundamental Cause of Long-Run Growth, in Phillippe Aghion and Steven N. Durlauf (editor). *Handbook of Economic Growth*. Vol. 1A. North-Holland, Elsever B.V.